

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA TANGGUH BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Oleh

Muhammad Ridwan Caesar<sup>1)</sup> Hafid Maulana Akbar Al-Husen<sup>2)</sup> Nurhadi<sup>3)</sup> Syaehu Mubarok Ramadhan<sup>4)</sup>

<sup>1) 2) 3) 4)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kota Bandung

E-mail : Caesar.fisip13@gmail.com <sup>1)</sup> maulanakhan88@gmail.com <sup>2)</sup> nurhadiustadz392@gmail.com <sup>3)</sup> syaehumubarok10@gmail.com<sup>4)</sup>

**ABSTRAK.** Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Bandung dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan diantaranya, adanya transmisi komunikasi yang belum optimal dalam penyampaian kepada masyarakat dengan pihak penanggung jawab Desa Tangguh Bencana, sumber daya relawan Tangguh bencana yang belum mencapai standar minimal, kurangnya tenaga ahli di lembaga BPBD dan desa itu sendiri dan desa Tangguh bencana, masih adanya salah satu desa yang belum memiliki struktur birokrasi penanggung jawab desa tangguh bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori Edward III dalam Agustino (2020:154) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data diolah dengan pengumpulan data kemudian diedit dan akhirnya diinterpretasi. Kemudian analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Lalu untuk mengetahui kelayakan data dilakukan analisis keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian memaparkan bahwa Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana pada Badan penanggulangan Bencana sudah berjalan dengan baik Namun masih ada beberapa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hambatan tersebut diantaranya adalah masih belum menyeluruhnya pemetaan wilayah rawan bencana di kabupaten bandung sehingga menghambat sosialisasi penanggulangan bencana dan belum adanya strategi khusus sebagai pendekatan dalam penyampaian informasi tentang Desa Tangguh Bencana.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Desa Tangguh Bencana

## **ABSTRACT.**

*The implementation of the Disaster Resilient Village Policy at the Regional Disaster Management Agency in Bandung Regency is motivated by several problems, including communication transmission that has not been optimal in conveying it to the community with the person in charge of the Disaster Resilient Village, Disaster Resilient volunteer resources that have not reached the minimum standard, lack of manpower. experts at the BPBD institution and the village itself and the disaster resilient village, there is still one village that does not yet have a bureaucratic structure responsible for disaster resilient villages. This research uses qualitative methods, using Edward III's theory in Agustino (2020:154), namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy. Data collection techniques using observation, interviews and documentation studies. Next, the data is processed by data collection, then edited and finally interpreted. Then analyze the data by means of data reduction, data presentation, and verification. Then, to determine the suitability of the data, data validity analysis was carried out using triangulation techniques. The results of the research show that the implementation of the Disaster Resilient Village Policy at the Disaster Management Agency has gone well. However, there are still several obstacles in the Implementation of the Disaster Resilient Village Policy at the Regional Disaster Management Agency. These obstacles include the lack of comprehensive mapping of disaster-prone areas in Bandung Regency, thus hampering the socialization of disaster management and the absence of a specific strategy as an approach in conveying information about Disaster Resilient Villages.*

**Keywords:** Implementation, Policy, Disaster Resilient Villages

## PENDAHULUAN

Indonesia terletak di sekitar Khatulistiwa yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan hal ini menyebabkan, secara hidrogeografi wilayah Indonesia rawan banjir, tanah Longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan abrasi. Dampak negatif dari perubahan iklim global semakin membuat wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana terkait dampak perubahan iklim. Kerentanan ini dipengaruhi oleh masalah demografi antropologi dan masalah hukum yang belum terlaksana dengan baik.

Permasalahan ini pun dibahas dalam peraturan terkait tentang mitigasi bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi bentuk kewajiban negara melakukan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana". Tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum serta perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana, dengan program pembangunan pengalokasian dana

penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. Setiap pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana

Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menindak lanjuti amanat UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana membuat suatu kebijakan yaitu program dalamantisipasi bencana di tingkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah program desa tangguh bencana. Program ini ditegaskan dalam peraturan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 1 Tahun 2012 "merupakan desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana

yang merugikan". Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah. Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah: 1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana; 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; 5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Hal ini ditujukan kepada setiap daerah.

Dalam penelitian ini provinsi Jawa Barat khususnya daerah kabupaten Bandung menjadi fokus penelitian ini karena banyak daerah yang memiliki potensi bencana. Seperti dalam peta daerah rawan bencana. Di Kabupaten Bandung adanya potensi bencana berupa banjir, longsor, kebakaran, gempa bumi,

dan kebakaran hutan. Dari tragedi bencana yang terjadi pada tahun 2022 kebakaran hutan terjadi sebanyak 39 di 10 Kecamatan, Angin Kencang terjadi sebanyak 19 di 14 kecamatan bencana Banjir terjadi sebanyak 41 di 15 Kecamatan, dan pergerakan Tanah Longsor terjadi sebanyak 26 di 11 Kecamatan. Upaya cepat dan efektif yang perlu dilakuakn oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu membangun Sumber daya yang siap menghadapi dan menanggulangi bencana agar Implmentasi Dari kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 juga bisa diterpkan secara efesien.

Program Desa Tangguh bencana yang diusung oleh Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi analisis efektifitas penanganan mitigasi bencana di tingkat daerah

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk memahami implementasi sebuah kebijakan, terdapat model implementasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar teori yaitu model Edwards III, mengingat model tersebut sesuai dengan design penelitian ini. Model ini dikemukakan oleh George C. Edwards. Model ini mengajukan empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi (communication), sumber daya, kecenderungan-

kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku (dispositions), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure). Empat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan.

#### a. Komunikasi

Komunikasi sebagai salahsatu unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Unsur komunikasi pada organisasi dilakukan dengan menjelaskan maksud dan sasaran kebijakan public secara rinci sehingga rencana dan penerapan kebijakan dapat di optimalkan. Setiap kebijakan publik tentunya akan ada pihak yang tidak sejalan dan perlu diantisipasi atau pihak yang resisten terhadap kebijakan yang dipilih. Dengan demikian unsur komunikasi di harapkan dapat membentuk pemahaman yang sama untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan kebijakan publik yang sudah di putuskan.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bentuk finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Maka Indikator-indikator yang

digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: 1) staf, 2) informasi, 3) wewenang, dan 4) fasilitas.

#### c. Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekwensi-konsekwensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap satu implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

#### c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting: pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. Selanjutnya ada 2 (dua) karakteristik utama didalam birokrasi yakni: 1) SOP, 2) Fragmentasi,

bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah dengan menggunakan :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Pustaka atau Dokumentasi

Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data diantaranya:

- a. Pengumpulan Data
- b. Editing Data
- c. Interpretasi Data

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Data Reduction (Reduksi Data)
- b. Display (PenyajianData)
- c. Triangulasi
- d. Simpulan dan Verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari pola implementasi mitigasi bencana di Kabupaten Bandung semua halnya telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan UUD 24 TAHUN 2007 tentang mitigasi bencana meskipun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Berikut merupakan pembahasan dalam Implementasi Kebijakan Desa Tangguh

Bencana Di Kabupaten Bandung diantaranya sebagai berikut:

### a. Komunikasi

Adanya transmisi komunikasi yang belum optimal dalam penyampaian kepada masyarakat dengan pihak penanggung jawab Desa Tangguh Bencana seperti masih adanya pemahaman bahwa tindakan penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, kemudian belum terbentuknya PRB di beberapa Desa Tangguh Bencana hambatan yang terjadi dalam strategi komunikasi itu belum menyeluruhnya pemetaan wilayah potensi bencana di Kabupaten Bandung dikarenakan terkendala sumber daya manusia yang kurang dalam tim pemetaan wilayah potensi bencana hal ini dengan adanya beberapa desa yang belum memiliki struktur Organisasi Desa Tangguh Bencana sehingga program desa tangguh bencana hanya dilaksanakan oleh pelaksana desa

### b. Sumber daya

Sumber daya relawan Tangguh bencana yang belum mencapai standar Minimal. Masih kurang sumber daya manusia dalam penerapan desa Tangguh Bencana, hal ini dilihat dari sumberdaya manusia yang masih belum bisa berperan aktif mendorong kegiatan Desa Tangguh Bencana

Kekurangan tenaga ahli dan belum maksimalnya optimalisasi anggaran untuk Desa Tangguh Bencana

c. Disposisi

Belum konsistennya para relawan Tangguh Bencana dalam melaksanakan tugas dikarenakan masih memiliki kepentingan pribadi diluar.

d. Birokrasi

Masih belum optimalnya struktur birokrasi desa tangguh bencana, dilihat dari masih adanya salah satu desa yang belum memiliki struktur birokrasi penanggung jawab desa Tangguh bencana, hanya ada relawan lepas yang tidak terkoordinir langsung oleh pihak desa sebagai pelaksana program desa Tangguh bencana.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung berupaya menyusun strategi khusus untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi Desa Tangguh Bencana, dan merangkul generasi muda serta lebih spesifik dalam pendekatan kepada masyarakat melalui pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan perguruan tinggi dan penambahan jumlah sumber daya manusia tenaga ahli dalam upaya mempercepat pemetaan wilayah potensi bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menekankan pelatihan dengan wawasan keorganisasian serta hak dan kewajiban masyarakat dalam berperan aktif menagatasi kebencanaan terutama pada tingkat relawan

Di bentuknya personil tambahan dari LSM, organisasi Masyarakat lain dalam berperan serta membantu program desa tangguh bencana di desa Nanjung Mekar dan memiliki kewenangan yang diatur dalam PRB desa. Serta mebuat panduan PRB yang efektifis serta efisien dalam pengurangan resiko bencana

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implmentasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Di BPBD Kabupaten Bandung dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan indikator Implmentasi Kebijakan dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Program Desa Tangguh Bencana ini setiap desa bisa mandiri dalam mengatas permasalahan bencana baik sebelum bencana, saat bencana dan sesudah bencana.

Namun masih ada beberapa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Masih belum menyeluruhnya pemetaan wilayah rawan bencana di

kabupaten bandung sehingga menghambat sosialisasi penanggulangan bencana,

2. Belum adanya strategi khusus sebagai pendekatan dalam penyampaian informasi tentang desa Tangguh bencana,
3. Sedikitnya tenaga ahli dalam sumber daya manusia menjadi permasalahan utama dalam implementasi desa Tangguh bencana,
4. Konsistensi pelaksana desa Tangguh bencana yang bermasalah karena masih memiliki kepentingan lain.

Upaya dari pihak BPBD itu sendiri untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan desa Tangguh Bencana diantaranya adalah dalam komunikasi melakukan percepatan pemetaan wilayah potensi bencana di tingkat Desa, dalam Sumber daya meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan dan penambahan jumlah sumber daya manusia pada rapat koordinasi internal BPBD, dalam disposisi menekankan pelatihan dengan wawasan keorganisasian serta hak dan kewajiban masyarakat dalam berperan aktif mengatasi kebencanaan, dalam birokrasi dibentuknya personil tambahan dari LSM, organisasi Masyarakat lain dalam berperan serta membantu program desa tangguh bencana di desa Nanjung Mekar dan memiliki kewenangan yang diatur dalam PRB desa.

## Saran

Adapun saran dari peneliti untuk Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana di BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya strategi sosialisasi yang merata kepada pelaku desa Tangguh bencana agar tidak adalagi pelaku Desa Tangguh bencana yang kekurangan informasi
2. Perlu diadakan perekrutan sumber daya manusia untuk program desa Tangguh bencana dari pihak BPBD
3. Perlu diadakan seminar edukasi tentang pentingnya desa Tangguh bencana ini kepada masyarakat agar mereka mengerti bahwa program ini sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat
4. Perlu adanya pembinaan administratif dalam pelaksanaan desa Tangguh bencana

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2020. *Dasar Dasar kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta
- Fajar Trisakti 2020. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung: FISIP UIN Sunan Gunung Jati
- Hamali, Arif Y. 2019. *Pemahaman Praktis Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Jakarta; Penada Media Grup
- Isrento E. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Cintiya Pres
- Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moelong, Lexy J. 2017. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Rosdakarya Offset
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Aceh; Unimal Pres
- Mulyadi Dedi 2017. *Studi Kebijakan Publik dan Analisis Pelayanan public*. Jakarta; Pustaka Media

- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013  
Penyelenggaraan Penanggulangan  
Bencana di Kabupaten Bandung
- Peraturan Bupati No 131 Tahun 2021  
Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Bandung
- Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012  
Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh  
Bencana
- Prihati. 2018. *Implementasi Kebijakan Promosi  
Pariwisata dalam Pengembangan  
Potensi Wisata Daerah*. Surabaya:  
Jakad Media Publishing.
- R. Rijanta, D. 2018. *Modal Sosial dalam  
Manajemen Bencana*. Yogyakarta:  
UGM Press.
- Rohmah T, Opan Arif & Mulyadi. 2020.  
*Manajmen Mitigasi Bencana*. Kab.  
Bandung; Bhakti Persada Bandung
- Sawir M. 2021. *Ilmu Administrasi dan  
Kebijakan Publik*. Yogyakarta; CV Budi  
Utama
- Silalahi U. 2018. *Studi Tentang Ilmu  
Administrasi (Teori dimensi dan  
Konsep)*. Jakarta; Algensindo
- Siswadi S 2017. *Administrasi Logistik dan  
Gudang (Kasus dan Aplikasi  
Perusahaan)*. Jakarta; Algensindo
- Sjamsudin Indradi. 2019. *Hukum Administrasi  
Negara*. Malang; SETARA
- Suardi Ismail. 2021. *Mitigasi Bencana*.  
Indramayu; Penerbit Adab
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian  
Administrasi*. Bandung; Alfabeta
- Syafie, Inu Kencana. 2017. *Ilmu Administrasi*.  
Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Thoha Miftah. M. PA. 2017. *Dinamika Ilmu  
Administrasi Publik*. Depok;  
KENCANA
- Undang Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang  
Penanggulangan Bencana
- Usman, F. 2020. *Kearifan Lokal dalam Proses  
Evakuasi Akibat Dampak Erupsi  
Gunung Bromo*. Jawa Timur: Qiara  
Media.
- Ustino. 2018. *Disaster Manajemen*. Medan;  
Perdana Publishing